

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Guru Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan tenaga profesional dengan kompetensi tertentu yang berperan dalam memberikan pendampingan kepada peserta didik, agar dapat berkembang secara optimal. Identitas gabungan antara “Guru” (secara umum) dan “Guru BK” melekat secara bersamaan pada tenaga profesional yang menangani bidang Bimbingan dan Konseling di sekolah. Terdapat berbagai istilah untuk menyebut tenaga profesional yang bertugas mendukung kesejahteraan (*well-being*) peserta didik di sekolah, di beberapa negara selain Indonesia, istilah yang digunakan adalah “*School Counselor*,” “*Guidance Counselor*,” “*Educational Counselor*” dan “*School Psychologist*”. Namun tenaga profesional yang paling sering disebutkan dalam beberapa hasil penelitian sebelumnya adalah *School Counselor* dan *School Psychologist*. Penulis menggunakan istilah Guru Bimbingan dan Konseling (Guru BK) sebagai subjek pembahasan pada penelitian ini, sebagai istilah yang lebih umum di Indonesia.

Identitas gabungan sebagai pendidik/guru dan sebagai konselor/guru BK tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lainnya. Sebuah artikel yang ditulis Levy & Lemberger-Truelove (2021) dengan judul *Educator–Counselor: A Nondual Identity for School Counselors* mengangkat hal ini, dan menuliskan bahwa identitas gabungan sebagai pendidik dan sebagai konselor dapat mempengaruhi peran dan tanggung jawab yang terkait dengan konseling di sekolah. Pada beberapa sumber, disebutkan bahwa terdapat perbedaan peran antara konselor sekolah dan psikolog sekolah. Asosiasi Konselor Sekolah Amerika/*America School Counselor Association (ASCA)*, menyebutkan konselor sekolah adalah pendidik bersertifikat/berlisensi yang meningkatkan keberhasilan siswa untuk semua peserta didik dengan melaksanakan program konseling sekolah yang komprehensif. Tugas konselor sekolah merancang dan menyampaikan program konseling sekolah yang meningkatkan hasil belajar siswa. Mereka memimpin, memperjuangkan, dan berkolaborasi untuk mempromosikan keadilan dan akses bagi semua siswa dengan menghubungkan program konseling sekolah mereka dengan misi akademis sekolah dan rencana perbaikan sekolah. Mereka menjunjung tinggi standar etika dan

profesional ASCA dan mempromosikan pengembangan program konseling sekolah berdasarkan area berikut dari Model Nasional ASCA: mendefinisikan, menyampaikan, mengelola, dan menilai (ASCA, 2023).

Berbeda dari konselor sekolah yang bertanggung jawab kepada peserta didik dalam jumlah besar, seorang psikolog sekolah hanya memiliki tanggung jawab dalam menangani peserta didik dengan kebutuhan atau kondisi tertentu. Mereka juga memiliki kewenangan dalam melakukan penilaian psikologis dan melakukan terapi sebagai intervensi (Cadime & Mendes, 2024). Mereka dapat menggunakan penilaian untuk tujuan mendapatkan diagnosis, tetapi sebagian besar waktu penilaian digunakan untuk tujuan menentukan kelayakan (misalnya, untuk layanan pendidikan khusus) dan untuk membuat keputusan berbasis data. Mereka memberikan layanan konseling secara khusus kepada peserta didik yang membutuhkan. Berdasarkan peran yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa guru BK di Indonesia secara umum memiliki peran seperti konselor sekolah, tetapi juga melakukan beberapa tugas psikolog sekolah.

Kompleksitas peran guru BK di Indonesia tentu perlu diiringi dengan kompetensi yang diharapkan dapat ditampilkan dalam pelaksanaan tugas profesi ini di sekolah. Kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru BK ini sebelumnya pernah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, yang menjelaskan rumusan standar kompetensi konselor yang dikembangkan berdasarkan empat kompetensi pendidik, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional (Indonesia, 2008). Kompetensi ini juga dideskripsikan lebih terperinci dalam kode etik bimbingan dan konseling Indonesia yang dikeluarkan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Peningkatan kompetensi guru BK tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan organisasi profesi, namun juga menjadi tanggung jawab guru BK itu sendiri untuk dapat mengembangkan setiap kompetensi agar dapat menyelenggarakan layanan BK yang berkualitas.

Kompetensi guru BK akan sangat mempengaruhi penyelenggaraan layanan BK di sekolah yang menuntut kemampuan guru BK untuk dapat membangun hubungan baik dan menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak (Boccio, 2021), tidak hanya peserta didik, tetapi juga guru mata pelajaran, kepala sekolah (Stone, 2022), tenaga

administrasi, orang tua dan pihak-pihak terkait lainnya. Guru BK memainkan peranan penting dalam menjaga iklim sekolah yang ramah sekaligus menciptakan budaya kemitraan komunitas yang efektif untuk sekolah dan keluarga (Yildiz, 2021). Namun, polemik mengenai peran dan tanggung jawab guru BK menurut Lewis et al. (2022) serta meningkatnya keragaman dan populasi peserta didik di sekolah tidak hanya menimbulkan keunikan masalah tetapi juga menghadirkan berbagai dilema bagi guru BK yang lebih kompleks dibandingkan tenaga profesional lainnya di sekolah (Laletas, 2019).

Dilema yang dihadapi guru BK cenderung menempatkan posisi mereka pada pilihan yang sulit yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang diambil rentan menimbulkan kerugian bagi peserta didik. Selain perbandingan rasio yang tidak seimbang antara peserta didik dan guru BK di sejumlah sekolah, terdapat hal-hal lain yang dapat mempengaruhi situasi ini. Pertama, guru BK di sekolah memiliki banyak peran berbeda yang dapat menyebabkan prioritas yang saling bertentangan. Kedua, klien/konseli utama guru BK sekolah adalah anak di bawah umur, yang hak hukumnya dimiliki oleh orang tua atau wali mereka. Ketiga, faktor agama, budaya dan berbagai faktor lainnya yang melekat pada karakteristik masyarakat memiliki pengaruh terhadap kompleksitas masalah terutama yang menghadirkan dilema etik.

Berdasarkan hasil survey dilema etik yang melibatkan 219 guru BK di Indonesia, ditemukan bahwa 93,2% masalah yang umum terjadi adalah pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Sekilas kasus-kasus pelanggaran peserta didik ini tampak umum, namun ketika diiringi penilaian terhadap kondisi geografis, latar belakang peserta didik hingga keterlibatan rekan sejawat dalam penanganan kasus, maka permasalahan ini dapat menghadirkan pertentangan prinsip etik bahkan benturan antara kode etik profesi dengan peraturan sekolah yang berujung pada dilema etik bagi guru BK. Beberapa kasus-kasus sensitif yang menghadirkan dilema etik juga ditemukan pada survey yang telah dilakukan, seperti peserta didik berkelahi/melawan dengan guru (30,3%), hamil (28%), mengalami kekerasan (17%) ataupun pelecehan (22%), hingga keinginan bunuh diri (15,6%).

Menghadapi kasus yang menghadirkan berbagai dilema ini, guru BK harus mampu mengenali bentuk dilema etik yang berdasarkan kewaspadaan terhadap

standar etis dan hukum yang berlaku (Cottone & Tarvydas, 2016). Pada saat bersamaan, guru BK harus dapat menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak agar proses layanan BK yang akan diselenggarakan dapat terlaksana secara optimal, namun disisi lain mereka juga harus berupaya menghindari keterlibatan pihak-pihak lain yang dapat mengganggu jalannya intervensi yang telah direncanakan. Begitu juga dalam hubungan dengan peserta didik yang sedang ditangani, di satu sisi, guru BK harus menjaga kepercayaan peserta didik terkait permasalahan yang sedang dihadapinya, namun disisi lain, guru BK harus melibatkan pihak lain demi keselamatan peserta didik di sekolah. situasi-situasi ini tentu menghadirkan beragam dilema etik bagi guru BK di sekolah.

Hal inilah yang membuat pengambilan keputusan dilema etik perlu mendapat perhatian karena pengambilan keputusan ini memerlukan pertimbangan dari berbagai sisi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan (*well-being*) baik pada peserta didik (M. K. Johnson et al., 2022), maupun pada guru BK itu sendiri (Jones & Pijanowski, 2023). Namun dalam sejumlah penelitian ditemukan bahwa guru BK pada umumnya mengambil keputusan berdasarkan intuisi atau insting (Levitt, 2019), pertimbangan etis atau nilai-nilai pribadi (Burkholder et al., 2020; Luke et al., 2017) dan bukan nilai-nilai profesi atau hukum yang mengatur praktik profesi (Burkholder et al., 2020), sehingga dampak dari keputusan tersebut kerap kali tidak dapat dipertanggungjawabkan bahkan guru BK harus menanggung konsekuensi apabila keputusan dilema etik yang dipilih beresiko secara hukum.

Menurut Maki et al. (2022) pengambilan keputusan dilema etik memerlukan pengetahuan mendalam dan kepekaan terhadap isu-isu etika serta langkah prosedural atau metode sistematis yang tepat dengan memperhatikan berbagai aspek salah satunya kode etik yang dapat mempengaruhi keputusan dan mempertimbangkan dampak terutama terhadap kesejahteraan peserta didik. Kode etik menjadi rujukan bagi guru BK dalam mengambil keputusan terkait dilema etik yang dihadapinya. Meskipun terdapat kemungkinan kode etik profesi tidak selalu dapat diterapkan pada situasi atau permasalahan tertentu (Cottone & Tarvydas, 2016; Nirwana et al., 2021). Menghadapi dilema etik merupakan tantangan bagi guru BK yang memerlukan kemampuan tentang memandang dilema dari berbagai perspektif dan menggunakan keterampilan berpikir kritis untuk memeriksa

kompleksitas dilema etika di lingkungan sekolah (Joe & Borland, 2023). Hal ini menjadi perhatian para peneliti menyoroti pentingnya guru BK untuk terus mengevaluasi dan merefleksikan tindakan yang mereka pilih, ketika dihadapkan pada dilema etis dan bekerja melalui model pengambilan keputusan (Burkholder et al., 2020). Namun, menurut Johnson (2020) dan Brown and Armstrong (2022), penelitian yang dilakukan mengenai penggunaan dan pelatihan model pengambilan keputusan etis masih terbatas, hal ini menjadi salah satu faktor lemahnya kemampuan guru BK dalam pengambilan keputusan saat menghadapi dilema etik.

Berdasarkan sejumlah hasil penelitian yang penulis kumpulkan, terdapat berbagai model pengambilan keputusan etik yang telah dikembangkan untuk ragam profesi yang ada termasuk tenaga kesehatan mental seperti konselor sekolah dan psikolog sekolah. Model-model ini dikembangkan dengan langkah, format ataupun modifikasi dari model sebelumnya seperti Lembar Kerja A-B-C-D-E (Sileo & Kopala, 1993); Model Konstruktivisme Sosial (Cottone, 2001), *Transcultural Integrative Model (TIM)* yang dikembangkan (Garcia et al., 2003) dan berbagai model lainnya. Salah satu model pengambilan keputusan yang diperuntukkan bagi konselor sekolah adalah *Solutions To Ethical Problems in Schools (STEPS)* yang dikembangkan Carolyn B. Stone. STEPS bahkan dimasukkan ke dalam kode etik ASCA pada tahun 2016 dan direvisi pada tahun 2022. Penulis belum menemukan model pengambilan keputusan dilema etik dalam konteks pendidikan di Indonesia terutama yang dikembangkan secara khusus di bidang bimbingan dan konseling. Sejauh pemantauan penulis terhadap literatur berbahasa Indonesia maupun dalam ruang lingkup BK di Indonesia belum ada penelitian yang mengangkat hal ini secara spesifik. Model pengambilan keputusan dilema etik yang ada juga lebih menitikberatkan pada sebelum dan selama proses pengambilan keputusan dilakukan dan belum mempertimbangkan hal-hal yang perlu diperhatikan setelah proses pengambilan keputusan dilakukan.

Model pengambilan keputusan dilema etik yang diajarkan secara umum bagi guru dan kepala sekolah di Indonesia diperkenalkan melalui modul guru penggerak dengan mengadaptasi 9 (sembilan) langkah pengambilan keputusan yang dikembangkan Rusworth M. Kidder tahun 1995 (Kurniawaty & Faiz, 2022; Nurcahyani & Rajasa, 2022). Meskipun modul guru penggerak juga dapat di akses

oleh guru BK yang terdaftar sebagai guru penggerak, namun perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan dilema etik antara guru BK dengan tenaga profesional lainnya di sekolah. Selain itu, modul ini hanya disampaikan terbatas pada peserta yang terdaftar pada program tersebut saja.

Temuan-temuan dilapangan yang menggambarkan berbagai dilema etik yang dihadapi guru BK di sekolah, minimnya pengetahuan dan keterampilan guru BK dalam mengambil keputusan, serta dampak yang ditimbulkan baik bagi peserta didik maupun guru BK itu sendiri, merupakan sebuah tantangan yang memerlukan strategi yang dapat segera diaplikasikan di lapangan. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk menemukan model pengambilan keputusan dilema etik yang dikonstruksi bersama guru BK dari berbagai wilayah di Indonesia, sehingga memiliki sensitivitas terhadap potensi dilema etis (Luke et al., 2017). Sensitivitas ini dibangun sejak awal ketika kasus ditemukan hingga sebuah keputusan ditetapkan (Cottone & Tarvydas, 2016). Penulis berharap melalui pengambilan keputusan dilema etik yang tepat dapat meningkatkan eksistensi guru BK dan menyelenggarakan layanan secara optimal serta profesional.

## **1.2. Pembatasan Penelitian**

Cakupan masalah dalam penelitian ini terkait tahapan yang diperlukan bagi guru BK dalam mengambil keputusan saat berhadapan dengan dilema etik. Tahapan yang diperlukan memiliki langkah dan prosedur terstruktur agar menjadi dasar yang kuat dan tepat dalam pengambilan keputusan. Sehingga fokus penelitian ini adalah pengembangan tahapan dan langkah-langkah yang dirangkum dalam model pengambilan keputusan dilema etik untuk digunakan oleh guru Bimbingan dan Konseling di sekolah.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan model pengambilan keputusan etik yang dapat digunakan guru BK saat menghadapi dilema etik. Sehingga perlu dirumuskan masalah dalam rancangan penelitian ini secara khusus, yaitu :

1. Bagaimana perspektif dan gambaran dilema etik yang dihadapi guru BK?

2. Bagaimana proses pengambilan keputusan dilema etik dilakukan oleh guru BK saat ini?
3. Bagaimana model pengambilan keputusan dilema etik yang terstruktur dan relevan untuk guru BK di Indonesia?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pengambilan keputusan dilema etik yang dapat digunakan dalam menghadapi dilema etik guru BK di sekolah. Tahapan pengambilan keputusan dilema etik ini diharapkan dapat membantu guru BK mempertimbangkan langkah yang akan dipilih sehingga mampu mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Temuan dalam tulisan ini juga dapat menjadi referensi dalam memberikan strategi pengambilan keputusan yang dapat dicantumkan pada kode etik dan pengembangan program pelatihan bagi guru BK di masa yang akan datang.

#### **1.5. Kebaruan Penelitian**

Ketidakmampuan guru BK dalam mengambil keputusan saat menghadapi dilema etik dapat menimbulkan kerugian bagi peserta didik dan pada guru BK itu sendiri. Oleh karena itu, untuk membantu guru BK menghadapi dilema etik, diperlukan model pengambilan keputusan yang sesuai dengan konteks permasalahan di sekolah. Sehingga Guru BK dapat menghasilkan sebuah keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pentingnya keterampilan dan ragam model pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etik telah dipaparkan dalam penelitian sebelumnya. Namun penelitian ini menghasilkan model pengambilan keputusan dilema etik yang belum pernah dikembangkan secara khusus bagi guru BK dalam konteks pendidikan di Indonesia. Perbedaan karakteristik peserta didik, tenaga profesional, dinamika masalah, hingga kultur budaya menjadi ciri khas yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan guru BK di Indonesia.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **1.6.1. Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat memberi kontribusi pada pengembangan teori dan praktik etik dalam bimbingan dan konseling di Indonesia dan dapat bermanfaat bagi peneliti lainnya sebagai referensi dalam melakukan penelitian dengan topik serupa. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi organisasi profesi BK dalam mempertimbangkan model pengembangan pengambilan keputusan yang dapat direkomendasikan pada kode etik profesi.

### **1.6.2. Praktis**

Model pengambilan keputusan dilema etik ini dapat dimanfaatkan guru BK dalam pengambilan keputusan menghadapi dilema etik di sekolah. Bagi lembaga pendidikan maupun pelatihan, model pengambilan keputusan ini dapat dijadikan salah satu materi dalam program pendidikan maupun pelatihan baik bagi mahasiswa maupun guru BK di lapangan agar dapat bertindak sebagai profesional yang etis serta mampu menghargai nilai etis.